

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

PBB adalah organisasi internasional yang didirikan 24 Oktober 1945 di San Fransisco dalam sebuah konferensi negara-negara pemenang Perang Dunia II.¹ PBB dibentuk untuk menggantikan *League of Nations* (Liga Bangsa-Bangsa) yang bertujuan memfasilitasi hubungan antar negara di bidang hukum internasional, keamanan internasional, pembangunan ekonomi, kehidupan sosial, dan hak asasi manusia.² PBB merupakan organisasi antar pemerintah yang mempunyai anggota paling besar, dan juga memiliki cakupan sektor pembahasan yang paling luas jika dibandingkan dengan organisasi internasional lain yang lebih cenderung memfokuskan diri kepada salah satu sektor saja (ekonomi, solidaritas Islam, regionalisme, dan lainnya). Sehingga banyak keuntungan yang didapat dari keanggotaan di PBB.

Keikutsertaan Jepang di PBB pada tahun 1956 adalah merupakan keinginan Jepang untuk kembali berbenah diri dan memperbaiki kesalahan dengan membangun kembali hubungan dengan negara-negara lain yang sempat memburuk akibat perang. Perkembangan ekonomi dan teknologi Jepang menjadikannya secara ekonomi kuat. Kekuatan ekonomi Jepang menjadikannya berkorelasi pada jumlah sumbangan Jepang di PBB. Jepang merupakan pendonor

¹ Dieter Nohlen (ed), *Kamus Dunia Ketiga, Gramedia Widiasarana Indonesia*, Jakarta, 1994, hal. 547.

² <http://www.vhrmedia.com/vhr-corner/agenda/Organisasi-Perserikatan-Bangsa-Bangsa-Terbentuk-704.html>. Gambar ini adalah isyarat laman seperti yang ditampilkan pada tanggal 1

bantuan terbesar kedua di PBB setelah Amerika Serikat. Jepang aktif dalam berbagai kegiatan di PBB. Namun Jepang merasa kurang leluasa untuk menjalankan politik luar negerinya karena di PBB terdapat Dewan Keamanan yang memiliki kekuasaan yang sangat besar dalam hal ini memiliki hak veto.

Di PBB terdapat Dewan Keamanan yang memiliki hak veto. Masyarakat internasional telah merasa bahwa DK PBB sudah tidak relevan lagi dengan zaman sekarang. Maka timbullah isu untuk mereformasi DK PBB. Isu tentang reformasi DK PBB sudah mulai pada tahun 1990-an. Banyak negara membahas pentingnya reformasi DK PBB dan sistem PBB pada debat umum Sidang Umum ke-47 – suatu sidang yang sangat berbeda dengan Sidang-Sidang Umum PBB lain di masa sebelumnya. Di setiap Sidang Umum (SU) Perserikatan Bangsa-Bangsa termasuk SU ke-63 pada akhir September 2008, ikhwal reformasi PBB selalu dibahas.³ Pemerintah Jepang menekankan keterkaitan antara kontribusi keuangan dan keanggotaan tetap DK PBB. Dubes Jepang untuk PBB, Yoshio Hatano, seringkali menyatakan “tak ada pajak yang tanpa perwujudan”.⁴

Beberapa saat setelah berakhirnya Perang Dingin, banyak orang Jepang memperkirakan Jepang bisa mampu mengambil kepemimpinan politik dalam hubungan internasional, dengan menggunakan kekuatan ekonominya, terlebih lagi krisis Perang Teluk meyakinkan pemerintah Jepang bahwa keanggotaan tetap DK adalah hal yang sangat penting bagi Jepang untuk memainkan peran politik yang penting.

³ <http://cetak.fajar.co.id/news.php?newsid=77902>. Gambar ini adalah jepretan laman seperti yang ditampilkan pada tanggal 29 Jan 2009 02:06:02 GMT.

⁴ <http://kakek.fajar.co.id/2008/08/ketika-pbb-jepang-dalam-tahun-1990-dan>

Pemerintah Jepang memiliki peran aktif di PBB. Pertama, pemerintah Jepang mengusulkan suatu RUU yang memungkinkan SDF untuk berpartisipasi dalam operasi pemeliharaan perdamaian PBB pada bulan Oktober 1990. Setelah kontroversi besar mengenai RUU tersebut, pemerintah berhasil meloloskan UU Kerjasama Perdamaian Internasional (PKO) pada Juni 1992. Kedua, pemerintah Jepang mengirimkan 600 anggota SDF ke Kamboja untuk bekerja sama dengan UNTAC berdasarkan UU PKO. Ini adalah pertama kalinya SDF berpartisipasi dalam suatu aktivitas di luar negeri sejak pembentukannya tahun 1954. Pemerintah Jepang mulai berusaha mendapatkan kebijakan PBB yang jauh lebih aktif dibandingkan kebijakannya di masa lalu.

Pada tanggal 28 Februari 2009 adalah sebagai batas akhir rencana negosiasi masalah perluasan keanggotaan Dewan Keamanan.⁵ Pada tahun 2005 Jepang ditolak pencalonannya untuk menjadi anggota Dewan Keamanan PBB oleh China yang memiliki hak veto. Menurut China, Jepang harus berbuat lebih banyak untuk menunjukkan penyesalan atas penjajahannya di Asia pada akhir Perang Dunia II. Untuk itu pemerintah Jepang harus meningkatkan pengaruhnya di dunia internasional. Kedekatan dengan negara-negara Afrika menjadi sasaran tertinggi kebijakan luar negeri Jepang dalam menghadapi kekuatan China.

Tahun 2008 ini dunia sedang dilanda krisis pangan. Kegawatan krisis pangan saat ini dapat digambarkan oleh beberapa data statistik. Menurut Josette Sheeran (Kepala WFP/*World Food Program*) kenaikan harga pangan, walaupun akan mempengaruhi semua tingkat pendapatan, akan terutama dirasakan oleh

⁵ <http://www.diplo.co.id/berita-diplo/berita-diplo-2009-02-28-01>

kelompok pendapatan rendah. Bagi kelompok pendapatan menengah kenaikan harga pangan akan menyebabkan golongan penduduk ini mengurangi pengeluaran rumah tangganya untuk keperluan kesehatan. Namun bagi golongan yang penghasilannya hanya USD 1 per hari, kenaikan harga pangan berarti harus dihentikannya pengeluaran rumah tangganya untuk konsumsi daging dan sayuran. Untuk dapat bertahan hidup saja kelompok penduduk miskin ini terpaksa menjual asetnya berbentuk rumah gubuknya dan ternaknya sehingga pada suatu saat nanti jikalau harga pangan mulai stabil akan menjadi lebih sulit bagi mereka untuk kembali bangkit. Statistik tentang gawatnya krisis pangan ini juga terlihat pada tingkat kenaikan harga pangan selama setahun terakhir ini. Gandum saja telah meningkat tajam sebelumnya 120% sejak Agustus 2007.⁶ Tahun 2007, kenaikan harga sebesar 70%.⁷ Sampai dengan Maret 2008 peningkatan harga gandum adalah 130%, kedelai 87%, jagung 31% dan beras 74%.⁸

Berdasarkan pantauan Badan Pangan dan Pertanian Dunia (*Food and Agriculture Organization/FAO*) 36 negara mengalami krisis pangan, 21 diantaranya adalah Negara-negara Afrika. Negara-negara Afrika yang terkena krisis pangan yakni Lesotho, Somalia, Swaziland, Zimbabwe, Eritrea, Liberia, Mauritania, Sierra Leone, Burundi, Republik Afrika Tengah, Chad, Congo, Côte d'Ivoire, Kongo, Ethiopia, Ghana, Guinea, Guinea-Bissau, Kenya, Sudan, dan Uganda. Maka sangat dibutuhkan perhatian negara-negara maju dalam membantu mengatasi Krisis Pangan Dunia. Kenaikan harga pangan dunia mengguncang

⁶http://www.bisnis.com/pls/portal30/url/page/bisnis_indonesia_harian_detail?vnw_lang_id=2&ptopik=A57&cdate=17-OCT-2008&inw_id=632321

⁷ <http://www.hinamagazine.com/index.php/2008/03/08/pbb-peringatan-inflasi-pangan/>.

⁸http://www.bappenas.go.id/index.php?module=Filemanager&func=download&pathtext=ContentE_xpress/info/&view=ANALISA_6MEI_2008%5B1%5D.pdf.

kehidupan ekonomi dan politik sejumlah negara dan memicu kemelaratan di seluruh dunia. Dalam laporan *Food and Agriculture Organization* (FAO) yang berjudul *Growing Demand on Agriculture and Rising Prices of Commodities* menunjukkan indeks harga pangan meningkat rata-rata 9% pada 2006 dibanding tahun sebelumnya. Bahkan pada 2007 indeks harga pangan meningkat 23% dibandingkan 2006. Sementara dalam *Food Outlook* yang dikeluarkan FAO hingga Tahun 2017 diramalkan harga pangan akan terus naik sejalan dengan lonjakan harga minyak mentah.⁹ Dalam jangka panjang krisis pangan di negara-negara miskin serta berkembang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan bantuan pangan atau perdagangan pangan dengan negara-negara maju, tetapi lebih tergantung pada perbaikan kapasitas produksi bahan pangan setempat dan yang penting juga perbaikan pendapatan dari penduduknya.

Banyak penyebab terjadinya Krisis Pangan Dunia diantaranya yakni akibat permintaan pangan yang meningkat sebagai akibat meningkatnya konsumsi, melonjaknya harga minyak bumi, perkebunan tanaman bioenergi, *devaluasi dollar* dan *inflasi global*, perubahan iklim, tidak memadainya metoda pertanian dan rendahnya tingkat efisiensi produksi serta masing-masing negara memprioritaskan produksi untuk kebutuhan domestiknya dan mengurangi ekspor.

Jepang merupakan salah satu negara termaju dalam berbagai bidang yaitu bidang ekonomi, teknologi ilmu pengetahuan, sosial, politik dan lain-lain. Jepang juga sebagai negara yang maju sektor pertaniannya. Penggarapan lahan pertanian di Jepang dilakukan secara intensif dengan didukung teknologi yang maju.

Adapun hasil-hasil pertaniannya meliputi padi, kentang, jagung, gandum, kacang, kedelai, teh, susu, peternakan babi, ayam, dan telur. Sayur-sayuran berupa lobak, kol, ketimun, tomat, wortel, bayam, dan selada.¹⁰ Sedangkan buah-buahan yang banyak ditanam adalah jeruk dan apel. Pemerintah Jepang memiliki pengalaman yang sangat baik dalam mengatasi masalah pangannya. Krisis Pangan yang terjadi sekarang ini sangatlah membutuhkan kerjasama dari negara maju untuk menciptakan stabilitas pangan yang merata di dunia, khususnya dalam meningkatkan produktivitas sektor pertanian.

Pemerintah Jepang memiliki peran yang cukup besar dalam mengatasi Krisis Pangan Dunia. Pemerintah Jepang membantu dengan menyumbang 200 juta dollar AS serta menambah bantuannya 50 juta dolar AS kepada negara-negara berkembang dalam KTT G-8 7-9 Juli 2008 untuk menangani masalah Krisis Pangan Dunia. Pemerintah Jepang membantu negara-negara Afrika untuk dapat melipatduakan produksi berasnya dalam waktu 5 tahun kedepan dari tahun 2008 sampai dengan tahun 2013 untuk mengurangi beban mereka atas kenaikan harga pangan dunia. Pemerintah Jepang juga membantu negara-negara Sub-Sahara yaitu negara-negara di benua Afrika yang tidak dianggap termasuk bagian Afrika Utara, yakni membantu dibidang teknologi dan infrastruktur untuk meningkatkan produksi pangan mereka dalam bentuk bantuan alat-alat produksi serta pengetahuan yang lebih maju dalam mengelola pertanian. Selain itu, Pemerintah Jepang juga ikut serta membantu mengatasi krisis pangan dunia yang disalurkan melalui *The United Nations World Food Programme* (WFP). Bantuan WFP di

satu pihak bertujuan memerangi langsung kelaparan di daerah darurat, di lain pihak mendukung dalam jangka panjang pembangunan ekonomi dan penjaminan pangan yang mandiri serta menghindari potensi efek sampingan yang fatal dari bantuan pangan.¹¹

Dari uraian diatas kita dapat melihat bahwa sejauh ini krisis pangan sudah sangat luas melanda dunia ini dan menjadikannya masalah yang sangat penting untuk diperhatikan. Krisis pangan dunia sangat dirasakan oleh negara-negara berkembang termasuk negara-negara Afrika. Negara Jepang yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia seolah memiliki kewajiban berperan aktif dalam menangani krisis pangan dunia 2008. Untuk meningkatkan ketahanan pangan dunia Pemerintah Jepang menitik beratkan bantuannya kepada negara-negara Afrika. Dan krisis pangan dunia 2008 ini dijadikannya sebagai momentum untuk lebih aktif lagi berperan di dunia internasional dalam hal ini membantu negara-negara yang terkena krisis pangan.

B. Tujuan Penelitian

1. Memberikan gambaran sejauh mana peran Pemerintah Jepang dalam menangani krisis pangan dunia 2008.
2. Untuk mengetahui mengapa pemerintah Jepang berperan aktif dalam menangani krisis pangan dunia 2008.
3. Mencoba mengaplikasikan ilmu dan teori yang pernah penulis peroleh dalam masa studi ke dalam bentuk tulisan.

¹¹ Diantar Mulya (ed). *Kemua Dunia Ketiga, Cemasia Widayana Indonesia*. Jakarta, 1994, hal

C. Pokok permasalahan

Mengapa Jepang berperan aktif dalam mengatasi Krisis Pangan Dunia 2008?

D. Kerangka Teoritis

Terhadap masalah yang akan dianalisis, kerangka teoritis selain berfungsi sebagai pisau analisa juga digunakan untuk menjembatani dan mengarahkan analisa suatu jawaban sementara (hipotesa) dari masalah yang ada. Teori juga selalu menunjukkan hubungan sebab akibat sehingga pada dasarnya teori merupakan pernyataan yang menjelaskan faktor-faktor terjadinya suatu gejala.

Saat ini perhatian dunia cenderung berubah dari *high politic ke low politic*, dimana krisis pangan dunia telah menjadi salah satu isu global yang ramai dibicarakan di dunia internasional. Dalam penelitian ini penulis mengambil konsep strategi untuk memudahkan penelitian. Rasionalitas strategis didasarkan pada asumsi bahwa perilaku pemilihan suatu strategi sungguh-sungguh didasarkan pada pertimbangan untung-rugi dalam pencapaian suatu tujuan yang jelas.¹² Umumnya perancangan strategi politik luar negeri tidak didasarkan pada pertimbangan moral, keyakinan, atau hal-hal emosional. Juga, perancangan strategi adalah tindakan yang penuh perhitungan; bukan tindakan untung-untungan. John Lovell mendefinisikan strategi adalah serangkaian langkah-langkah (*moves*) atau keputusan-keputusan yang dirancang sebelumnya dalam suatu situasi kompetitif dimana hasil akhirnya tidak semata-mata bersifat untung-

¹² (Yogyakarta: PAKSIA)

untungan. (“any predesigned series of moves, or series of decisions, in a competitive situation where the outcome is not governed purely by chance”).¹³

Politik luar negeri didefinisikan secara sederhana adalah suatu bentuk kebijaksanaan atau tindakan yang diambil dalam hubungan dengan situasi atau aktor yang ada diluar batas wilayah negara.

Untuk melakukan analisis strategi, Patrick Morgan menggambarkan kegiatan analisis politik luar negeri tidak berbeda dengan perilaku “kibitzer” (penonton permainan, misalnya catur, yang sangat aktif dan selalu berusaha memberi nasehat salah satu pemain tentang langkah apa yang harus diambil, walaupun tidak diminta). Untuk bisa “merancang strategi” itu si “kibitzer” harus mengetahui situasi dan menentukan apa sasaran yang hendak dituju. Kemudian ia merumuskan suatu strategi untuk mencapai tujuan itu. Dalam perumusan strategi itu ia harus memperhitungkan kemungkinan langkah-langkah, tujuan dan strategi pemain lain. Dalam analisis itu si analis berpikir seolah-olah dia adalah salah satu pemain dalam permainan politik luar negeri. Dalam melakukan itu ia memulai dengan asumsi-asumsi sebagai berikut :

1. Perilaku politik luar negeri suatu negara-bangsa pasti diarahkan untuk menciptakan satu atau beberapa tujuan internasional. Setiap tindakan yang diambil pasti dimaksudkan sebagai suatu langkah ke arah pencapaian tujuan itu.

¹³ John P. Lovell, *Foreign Policy in Perspective* (New York: Holt, Rinehart & Winston, 1970) h.65. Dalam pengertian ini, strategi tidak hanya menunjuk pada perancangan operasi militer dalam perang; ia juga bisa diterapkan pada berbagai situasi, termasuk dalam permainan seperti catur, bridge, sepak bola, dsb. Tetapi konsep strategi tidak bisa diterapkan untuk permainan yang

2. Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negara-bangsanya. Ini dilakukan dengan cara menelaah berbagai alternatif tindakan, masing-masing dinilai berdasar analisis biaya dan hasil. Alternatif tindakan yang diambil adalah yang memenuhi kriteria efisiensi.
3. Dalam dunia yang saling tergantung, ini berarti bahwa para pembuat keputusan itu harus memperhitungkan juga tujuan dan strategi berbagai negara-bangsa lain.

Seperti dikatakan oleh John Lovell, analisis politik luar negeri yang menerapkan perspektif strategis menafsirkan fenomena politik luar negeri terutama dalam pengertian suatu disain atau rancangan yang dibuat secara sadar oleh para pembuat keputusan untuk mencapai tujuan-tujuan yang diperebutkan oleh berbagai negara-bangsa lain.¹⁴

Merujuk dari kejadian masalah bahwa Jepang ditolak veto oleh China untuk masuk anggota tetap Dewan Keamanan PBB karena China beranggapan bahwa Jepang masih kurang optimal dalam membantu masyarakat dunia untuk menutupi kesalahan Jepang pada Perang Dunia II. Dengan semata-mata membantu negara-negara Afrika bukan berarti Jepang dapat masuk dengan mulus menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB. Akan tetapi dengan membantu tersebut dapat membuat "pencitraan" bahwa bangsa Jepang adalah bangsa yang baik dan dedikasi Jepang telah optimal di dunia internasional. Sehingga masyarakat internasional dapat mempercayainya untuk menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

¹⁴ Lovell, John. *International Politics: Analysis and Theory*. New York: McGraw-Hill, 1970.

Pemerintah Jepang berupaya untuk mengatasi krisis pangan dunia ini merupakan bagian dari strategi politik luar negerinya. Negara-negara Afrika yang terkena dampak dari krisis pangan saat ini sangat membutuhkan bantuan dari negara-negara maju, maka Jepang yang merupakan salah satu kekuatan ekonomi dunia berperan dalam membantu negara-negara Afrika untuk mengatasi krisis pangan disana dan sekaligus untuk meningkatkan ketahanan pangan dunia. dalam hal ini, Pemerintah Jepang tidaklah semata-mata membantu tanpa mengharapkan imbalan. Para pembuat keputusan selalu berusaha memaksimalkan perolehan bagi negara-bangsanya.¹⁵ Kedekatan dengan negara-negara Afrika merupakan sebagai perluasan diplomasi Jepang yang selama ini lebih difokuskan ke Asia dalam rangka mendapatkan pengaruh global. Bagi Jepang bantuan tersebut setimpal dengan dukungan yang diharapkan Jepang dari negara-negara Afrika. Upaya tersebut merupakan strategi pemerintah Jepang untuk tercapainya tujuan nasional yaitu keinginan Jepang untuk menjadi salah satu anggota Dewan Keamanan PBB.

E. Hipotesis

Jepang berperan aktif dalam menangani krisis pangan dunia 2008 karena pemerintah Jepang ingin mendapatkan dukungan dari negara-negara yang mengalami krisis pangan dunia untuk mendapatkan kursi tetap di Dewan

F. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah teknik pengumpulan data sekunder melalui *Library Research*. Sumber-sumber yang dipergunakan berupa buku-buku, referensi, literature, ensiklopedia, dokumentasi, hasil-hasil penelitian, jurnal dan penerbitan berkala, majalah dan surat kabar yang relevan dengan permasalahan Skripsi ini.

G. Jangkauan Penelitian

Untuk mempermudah penelitian dan menghindari kesulitan dalam mencari data, maka penulisan Skripsi ini dilakukan berdasarkan pada tahun 2006 sampai dengan 2008. Pada tahun 2006 merupakan awal meroketnya harga-harga pangan dan beralihnya petani ke *biofuel*. Pada tahun 2008 ini adalah puncak dari krisis pangan tersebut. Tidak menutup kemungkinan menggunakan data disekitar periode tahun di atas.

H. Sistematika Penulisan

Bab I : Merupakan pendahuluan yang memuat latar belakang masalah, tujuan penelitian, rumusan masalah, kerangka berfikir, hipotesa, teknik pengumpulan data, jangkauan penulisan, dan sistematika penulisan.

Bab II : Memberikan gambaran umum mengenai Jepang, juga menjelaskan lingkungan dan prespektif perkembangan pertanian dan teknologi pertanian di Jepang dalam kaitannya dengan isu Internasional tentang

krisis pangan dunia. Serta keinginan Jepang menjadi anggota tetap Dewan Keamanan PBB.

Bab III : Merupakan pembahasan mengenai krisis pangan dunia; awal mula, penyebab, dan dampaknya bagi dunia Internasional.

Bab IV : Pada bab ini menjelaskan tentang latar belakang pemerintah Jepang ikut berperan aktif dalam menangani krisis pangan dunia, dengan studi kasus: bantuan terhadap negara-negara berkembang.

Bab V : Menutupkan kesimpulan dari bab-bab diatas